

Sutindih ring Basa Bali; Sinergi Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah dalam Usaha Melestarikan Bahasa Bali

I Gede Gita Purnama A.P.

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana

penabicara85@gmail.com

Abstrak

Bahasa Bali merupakan satu dari ratusan bahasa daerah yang menjadi salah satu kekayaan budaya Bangsa Indonesia. Seperti hanya banyak bahasa daerah lain yang ada di Indonesia, bahasa Bali kini tidak dalam keadaan yang baik. Bahasa Bali menjadi salah satu bahasa daerah yang kebertahan dan keberadaanya dikhawatirkan. Keadaan ini dapat dilihat dari salah satu indikator yaitu bahasa Bali sudah tidak lagi menjadi bahasa primer sebagian besar suku Bali, khususnya yang tinggal di Bali. Kian berkurangnya jumlah penutur bahasa Bali tentu saja akibat dari berbagai faktor internal dan eksternal bahasa Bali. Faktor internal diantaranya adalah bahasa Bali memiliki tingkatan bahasa (kasar, madia, halus), kemudian aksara Bali memiliki aturan penulisan yang cukup rumit (*pasang pageh*). Faktor eksternal datang sebagai salah satu dampak kian terbukanya Bali pada pergaulan global, salah satunya melalui pariwisata. Muncul kecenderungan bahwa segala yang berbau asing, terutama bahasanya dianggap lebih baik dan lebih menjual. Penurunan tingkat penutur bahasa Bali ini kemudian memicu berbagai usaha-usaha pelestarian dan pengembangan ke arah modern, bersinergi dengan kebutuhan generasi “jaman now”. Kian kuatnya usaha pelestarian bahasa, aksara dan sastra Bali belakangan ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah yang telah mampu bersinergi dengan lembaga-lembaga sosial (LSM) non-pemerintah. Sinergi ini mampu menghasilkan terobosan baru dalam usaha pengembangan dan pelestarian bahasa, aksara serta sastra Bali. Pergerakan lembaga non-pemerintah yang fokus pada usaha pengembangan dan pelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali didukung oleh keberpihakan pemerintah daerah. Lembaga non-pemerintah yang belakangan cukup getol melakukan pergerakan diantaranya adalah Aliansi Peduli Bahasa Bali dan Hanacaraka Society. Atas sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah ini, lantas lahir slogan *Sutindih ring Basa Bali* yang artinya bersungguh-sungguh mengabdikan pada bahasa Bali. Semboyan ini melandasi kerja bakti, gotong royong, semangat berkarya bersama.

Kata kunci: *bahasa Bali, usaha pelestarian, sinergi, pemerintah, lembaga non-pemerintah*

Abstract

The Balinese language is one of hundreds of local language that contribute to cultural richness of Indonesia. Similar to other languages in Indonesia, the Balinese language has been currently in danger. As one of the local languages, the Balinese language concerns many linguists due to its today sustainability and existence. The indicator we can easily observe is that the language is not the primary language spoken in Bali anymore. The degradation is due to both internal and external factors. The internal factors are that the Balinese language has several speech levels (low, intermediate, high) and that the Balinese alphabets have complex writing rules (*pasang pageh*). Meanwhile, the external factors consist of any consequences due to more openness for global affairs, one of that is tourism, that has been created in Bali. People tend to believe that any foreign attributes, especially foreign languages, are better and more prospective. It encourages concerned parties to preserve and develop the Balinese language and lead it to modernity, so that the language can make a synergy with current condition. Recent strong attempts to preserve the Balinese language, alphabets, and literatures are also contributed by the government that has made a synergy with social non-government organizations. The synergy creates an innovation in attempts to both develop and preserve the Balinese language, alphabets, and literatures. Moreover, movements conducted by non-government organizations focusing on similar attempts are supported by the local government. Non-government organizations that has been actively developing and preserving the Balinese language, alphabets, and literatures are *Aliansi Peduli Bahasa Bali* and, *Hanacaraka Society*. Due to a well-established synergy between the government and these non-government organization, the slogan *Sutindih ring Basa Bali* (solemnly dedicating to the Balinese language) was generated. This slogan motivates the Balinese people to always work together.

Keywords: *Balinese language, preserving attempts, synergy, government, non-government organization*

I. PENDAHULUAN

Bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang hanya sedikit dimiliki bangsa lain. Keragaman bahasa daerah ini merupakan sebuah warisan peradaban yang wajib dijaga dan dilestarikan. Sebagai alat komunikasi sekaligus media dokumentasi, bahasa daerah menjadi salah satu sumber pengetahuan lokal yang jika dieksplorasi dengan baik dapat menjadi kekuatan tersendiri bagi bangsa kita. Karena itulah, usaha-usaha menjaga dan mengembangkan keberadaan bahasa daerah menjadi sangat penting dilakukan. Negara telah menjamin keberadaan bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan nasional sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 32 ayat 2. Pasal ini menyebutkan dengan tegas bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, hal ini menunjukkan bahwa bahasa daerah dan bahasa nasional sama pentingnya bagi negara.

Kewajiban menjaga dan melestarikan ini tidak hanya bertumpu pada penutur atau peneliti bahasa saja, akan tetapi seluruh komponen bangsa wajib turut andil dalam hal menjaga dan melestarikannya. Peran serta dan sinergi lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah menjadi salah satu pilar keberlanjutan bahasa daerah. Diantara sekian banyak bahasa daerah di Indonesia, satu diantaranya adalah bahasa Bali. Bahasa Bali adalah salah satu bahasa daerah yang hingga kini tetap digunakan serta dipertahankan oleh masyarakat penuturnya. Pengertian bahasa Bali di sini mencakup bahasa, aksara, serta sastra Bali. Berdasarkan jumlah penuturnya bahasa Bali merupakan bahasa dengan jumlah penutur yang besar. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka penutur bahasa Bali 3. 371.049 (BPS 2010). Bahasa Bali menempati urutan ke-8 dari jumlah penutur diantara seluruh bahasa daerah yang ada di Indonesia.

Salah satu fungsi bahasa daerah adalah sebagai identitas masyarakat penuturnya, dan bahasa Bali mengambil fungsi tersebut bagi etnik Bali, baik yang terdapat di Bali sendiri maupun di luar Bali. Bahasa Bali sebagai bahasa ibu etnik Bali memiliki fungsi sebagai bahasa komunikasi yang digunakan dalam komunikasi resmi maupun situasi komunikasi tidak resmi. Seperti halnya berbagai bahasa daerah yang terdapat di Indonesia, keberadaan bahasa Bali saat ini tidak sedang dalam kondisi yang baik. Sebab bahasa Bali tidak lagi menjadi bahasa pilihan

utama sebagai bahasa komunikasi etnik Bali. Hal ini terjadi akibat berbagai faktor, faktor internal dari bahasa Bali serta faktor eksternal bahasa Bali. Faktor internal dari bahasa Bali diantaranya adalah tingkatan bahasa (*angguh ungguh*) yang cukup rumit. Selain bahasa Bali, aksara Bali pun memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi karena terdapat aturan-aturan penulisan yang kompleks (*pasang pageh*). Akibat memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, penutur bahasa Bali ini kemudian menjadi takut menggunakannya karena takut terjadi kesalahan saat menggunakannya.

Faktor eksternal yang mendukung kian berkurangnya penutur bahasa Bali adalah dampak arus globalisasi dan industri pariwisata di Bali. Dua hal tersebut telah merubah lanscape kebahasaan di Bali. Masyarakat Bali menjadi masyarakat yang bilingual bahkan trilingual. Industri pariwisata menuntut penggunaan bahasa asing, sehingga bahasa asing dianggap bahasa yang wajib dikuasai jika hendak mendapatkan bagian rejeki dari dunia pariwisata. Bagi sebagian besar orang tua, khususnya pasangan muda terlebih yang telah bergerak pada industri pariwisata akan lebih memilih anaknya belajar bahasa asing ketimbang bahasa Bali. Bahasa Bali dianggap tidak penting dan tidak menghasilkan. Hal ini menurut pandangan Sutjiati (2017) adalah sebagai salah satu dampak dari pengaruh pola hidup konsumtif dan hedonis yang kian menjangkit pada masyarakat Bali. Sehingga mereka berusaha memenuhi segala kebutuhan konsumtifnya dengan mengumpulkan sebanyak mungkin uang, salah satunya melalui modal intelektual yaitu penguasaan bahasa asing. Sebab dengan menggunakan bahasa asing mereka yakin akan bisa mendatangkan pemasukan finansial (hlm.125-126).

Berdasarkan paparan di atas, beberapa masalah yang dapat dikemukakan diantaranya adalah: 1) Bagaimanakah sinergi pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah dalam melestarikan bahasa Bali? 2) Gerakan-gerakan apa saja yang telah dilakukan untuk melestarikan bahasa Bali, khususnya dalam perkembangan dunia digital?

II. LANDASAN TEORI

Bahasa Bali meski tergolong bahasa dengan jumlah penutur yang cukup besar, namun tetap memiliki kesempatan untuk menjadi bahasa yang terancam punah. Jika melihat klasifikasi Michel Krauss (dalam Ibahim, 2011, hlm. 36) bahasa-bahasa di dunia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, pertama adalah bahasa-bahasa yang punah (*moribund languages*), bahasa

yang masuk dalam kategori ini adalah bahasa-bahasa yang tidak lagi digunakan dan tidak lagi dipelajari oleh generasi penerus bahasa tersebut sebagai bahasa ibu (*mother language*). Kedua adalah bahasa-bahasa yang terancam punah (*endangered languages*), yang masuk dalam kategori ini adalah bahasa-bahasa yang meski digunakan dan dipelajari oleh generasi penerus bahasa tersebut, namun memiliki kemungkinan besar akan ditinggalkan pada masa yang akan datang. Ketiga adalah bahasa-bahasa yang aman (*safe language*), adalah bahasa-bahasa yang memiliki tingkat keselamatan tinggi karena mendapatkan perhatian dan dukungan kuat dari pemerintah serta memiliki penutur dalam jumlah besar.

Bahasa Bali sendiri masuk dalam kategori bahasa yang terancam punah, sebab bahasa Bali memiliki kecenderungan yang cukup tinggi untuk ditinggalkan oleh penuturnya. Oleh karena itulah perlu usaha-usaha yang serius dalam pemertahanan bahasa Bali. Pemertahanan bahasa menurut pandangan Fasold (1984) adalah puncak kesetiaan pemakai bahasa yang telah menetapkan pilihan pada pemilihan dan pemakaian bahasa tertentu dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pemertahanan bahasa lebih menyangkut bagaimana suatu komunitas tutur tertentu mempertahankan bahasa ibunya (hlm. 213-214). Pemertahanan bahasa dapat pula dikaitkan dengan usaha menjaga, menggunakan, dan meregenerasi penutur bahasa ibu atau bahasa daerah sehingga mampu tetap bertahan meski berada di tengah-tengah bahasa lainnya. Pemertahanan bahasa ini mengacu pula pada situasi persinggungan antar bahasa yang mencoba tetap mempertahankan eksistensinya dari berbagai faktor yang mungkin mengakibatkan pergeseran pemakaian bahasa ke bahasa lain.

Dinamika pemertahanan dan pergeseran bahasa melahirkan kesadaran sikap bahasa. Chaer (dalam Syahriyani, 2017, hlm. 255) mengemukakan beberapa ciri sikap bahasa, yaitu kesetiaan bahasa (*language loyalty*), kebanggaan bahasa (*language pride*), dan kesadaran adanya norma bahasa (*awareness of the norm*). Kesetiaan bahasa (*language loyalty*), adalah sebuah sikap yang mendorong masyarakat penutur suatu bahasa melakukan tindakan-tindakan pemertahanan terhadap bahasanya bahkan jika perlu menutup diri atas pengaruh bahasa lainnya. Tidak adanya dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya menandakan bahwa kesetiaan berbahasa penutur tersebut lemah. Hal ini dikategorikan sebagai aspek kognitif, yaitu aspek yang digunakan manusia untuk berpikir. Kebanggaan bahasa (*language pride*), mendorong masyarakat penutur untuk melakukan tindakan-tindakan pengembangan dan menunjukkan

kebanggaan dalam menggunakan bahasa. Pada sikap kebanggaan bahasa ini, bahasa ditempatkan sebagai identitas yang mutlak dan ikatan kesatuan masyarakat penuturnya. Hal ini berkaitan dengan aspek afektif yang dihubungkan dengan sikap positif dan negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan, bangga atau tidak bangga. Jika seseorang mengalihkan rasa bangganya terhadap satu bahasa ke bahasa lain, ia termasuk orang yang memiliki sikap bahasa yang negatif. Kesadaran adanya norma bahasa (*awareness of the norm*), mendorong masyarakat penutur bahasa untuk dapat menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, artinya masyarakat penutur akan menjadi begitu disiplin mengikuti aturan bertata bahasa sehingga mempengaruhi sebagian besar sikap serta tingkah laku (perbuatan) dalam keseharian. Pada bagian ini, aspek konatif atau perilaku yang berpengaruh.

Berdasarkan ketiga sikap bahasa inilah dapat dilihat fenomena sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah yang ada di Bali dalam usaha mereka melestarikan bahasa Bali. Kesetiaan berbahasa, kebanggaan berbahasa serta adanya norma bahasa melahirkan sebuah jargon yang cukup populer belakangan ini di Bali yaitu “*sutindih ring basa Bali*” (mengabdi pada bahasa Bali). Jargon ini membangun semangat bersama, membangun semangat yang tulus untuk bersama-sama melestarikan bahasa Bali. Baik pihak pemerintah maupun pihak non-pemerintah bersama-sama, memiliki kesadaran akan ketiga sikap bahasa tersebut. lembaga non-pemerintah mengawali lalu menggandeng pihak pemerintah yang juga menyambut dengan baik inisiatif gerakan-gerakan pelestarian tersebut. Sinergi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam bersama-sama melestarikan bahasa, aksara dan sastra Bali menjadi sebuah gerakan penting yang harus tetap terjaga. Bahkan gerakan ini seharusnya mampu menjadi kian masif dan merangkul masyarakat lebih luas lagi. Sinergi ini membangun usaha pemertahanan bahasa yang bisa lebih berkesinambungan, sehingga meningkatkan eksistensi bahasa, aksara dan sastra Bali. Peran pemerintah memang sangat signifikan dalam hal ini, Darwis mengungkapkan (2011) salah satu faktor yang mampu melemahkan bahasa daerah adalah tidak berpihaknya lembaga pemerintah pemegang kebijakan (hlm. 4). Keberpihakan lembaga pemerintah ini tentu saja dalam hal regulasi serta penganggaran dalam usah-usaha pelestarian bahasa daerah.

Setelah mampu membangun dan memupuk sikap bahasa yang positif, lanjutan atas sikap bahasa tersebut adalah perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa merupakan salah satu bagian usaha pembangun kebudayaan yang harusnya menjadi sorotan penting. Derasnya arus teknologi

saat ini memungkinkan tergerusnya bahasa asli (daerah). Suryani (2014) mengungkapkan bahwa perencanaan bahasalah yang saat ini memegang peranan penting, sehingga mampu berperan untuk menjaga kelestarian bahasa asli (hlm. 35). Proses perencanaan bahasa selalu harus melihat dan mengacu perubahan sosial di masyarakat, seperti perkembangan informasi sebagai akibat gerakan globalisasi. Era globalisasi informasi yang kian deras menjangkau masyarakat menyebabkan masyarakat lebih terbuka dan lebih cepat menerima informasi dari berbagai sumber.

Perencanaan bahasa Bali semestinya dilakukan oleh semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut memikirkan dan mengambil tindakan bagi pemecahan masalah-masalah yang ada dalam bahasa Bali. Jendra (2011) pernah mengungkapkan bahwa pihak-pihak yang seharusnya mengambil peran dalam usaha perencanaan bahasa Bali diantaranya adalah Pemda Bali, lembaga swasta yang memiliki perhatian pada bahasa Bali, pemerhati budaya, serta cendekiawan yang bergelut dalam bidang bahasa Bali (hlm.168).

III. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mencoba melihat upaya pemertahanan bahasa Bali dari berbagai bentuk sinergi lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Berbagai data didapatkan dengan mencari sumber data salah satunya melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data melalui sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan isu-isu pemertahanan bahasa Bali, baik melalui media cetak, peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang menjadi pijakan usaha pemertahanan bahasa, maupun buku-buku literatur yang berkaitan dengan pemertahanan bahasa.

Informan yang terlibat langsung dalam berbagai usaha pemertahanan bahasa Bali menjadi salah satu sumber data penunjang dalam penelitian ini. Teknik wawancara bebas terarah digunakan untuk mengumpulkan informasi akurat melalui informan dengan bantuan alat perekam sebagai media menyimpan data wawancara. Hasil pengumpulan data kemudian direduksi dan dianalisis dengan teori-teori yang berkaitan dengan pemertahanan bahasa sehingga menghasilkan pandangan-pandangan dan kesimpulan dalam penelitian ini. Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan mendeskripsikan hasil atau temuan dalam bentuk teks naratif.

IV. PEMBAHASAN

Sinergi Pemerintah Daerah Dan Lembaga Non-Pemerintah

Peran pemerintah daerah dalam segala usaha melestarikan identitas daerah, termasuk didalamnya bahasa adalah sangat besar. Kekuatan hukum serta kewajiban atas peran tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terutama pada Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 22. Pada pasal 13 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah provinsi (daerah) memiliki kewenangan untuk meningkatkan potensi kesejahteraan masyarakatnya berdasarkan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerahnya masing-masing. Pada Pasal 22 butir m, pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah dan wajib untuk melestarika nilai sosial budaya. Nilai sosial budaya yang tertuang pada ayat ini tentu saja termasuk bahasa daerah. Demikian pula peran pemerintah daerah pada usaha mengembangkan, membina, dan melestarikan bahasa dan sastra daerah telah diatur pada Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Pada pasal 42 jelas disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap dapat hidup sesuai fungsinya dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain dua Undang-undang tersebut di atas, juga terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, dalam undang-undang ini tidak hanya pemerintah yang memiliki kewajiban dalam segala usaha pemajuan kebudayaan- termasuk bahasa dan sastra- namun juga masyarakat secara luas memiliki kesempatan yang sama dalam usaha pemajuan kebudayaan.

Secara aturan, pemerintah daerah telah memilik kekuatan hukum yang sangat kuat dalam segala usaha melestarikan bahasa, aksara, dan sastra Bali, namun demikian meski memiliki payung hukum yang kuat, pemerintah daerah tidak dapat melakukan segala usaha tersebut sendiri. Pemerintah daerah sebagai lembaga negara memiliki kelebihan, namun juga tetap memiliki ruang gerak yang terbatas. Karena itulah pemerintah membutuhkan lembaga non-pemerintah yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam melestarikan bahasa, aksara dan sastra Bali. Beberapa tahun belakangan di Bali muncul lembaga-lembaga non-pemerintahan yang sangat konsisten dalam melakukan usaha-usaha pelestarian di bidang bahasa, aksara dan sastra

Bali. Lembaga-lembaga itu diantaranya adalah Aliansi Peduli Bahasa Bali dan Hanacaraka Society.

Aliansi Peduli Bahasa Bali adalah sebuah lembaga yang dimotori oleh anak-anak muda yang awal kelahirannya merupakan sebuah reaksi atas lahirnya Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menghilangkan mata pelajaran bahasa daerah dan menggantikannya dengan mata pelajaran seni budaya. Aliansi Peduli Bahasa Bali pertama kali dibentuk di Institut Hindu Dharma Indonesia pada tahun 2012. Lembaga ini beranggotakan mahasiswa, alumni, dosen, serta pemerhati budaya Bali. Gerakan pertama lembaga ini adalah melakukan tuntutan agar kurikulum 2013 memunculkan kembali mata pelajaran bahasa daerah, artinya tidak digabung dalam seni budaya.

Aliansi Peduli Bahasa Bali sempat melakukan demo di gedung DPRD Bali, untuk menyuarakan tuntutan mereka¹. Inilah yang mengawali langkah sinergi Aliansi Peduli Bahasa Bali dengan pemerintah daerah. Dampak lanjutan atas digabungnya bahasa Bali dalam seni budaya adalah tidak munculnya Uji Kompetensi Guru Bahasa Bali. Ini menjadi masalah lain yang cukup meresahkan guru-guru bahasa Bali. Bersama-sama DPRD Bali dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, LPMP Bali, dan Perwakilan Dinas Kebudayaan beberapa kali menyambangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan DPR-RI untuk memperjuangkan bahasa daerah khususnya bahasa Bali agar menjadi mata pelajaran tersendiri dalam kurikulum serta UKG bahasa Bali juga dapat dilakukan secara mandiri. Usaha ini kemudian disambut dengan penguatan dari lahirnya Pergub Nomor 20 Tahun 2013². Pergub ini memuat pasal yang mewajibkan bahasa Bali diajarkan minimal 2 jam pelajaran pada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga sekolah atas dan berlaku bagi semua sekolah baik sekolah negeri maupun swasta. Pelajaran bahasa Bali juga menjadi mata pelajaran tersendiri tidak digabung ke dalam seni budaya.

¹ <http://metroball.com/ribuan-mahasiswa-bali-demo-tolak-kurikulum-2013/>
<https://news.detik.com/berita/d-2145260/mahasiswa--dosen-di-denpasar-tolak-penghapusan-bahasa-daerah->
<https://nasional.kompas.com/read/2013/04/01/10383825/bahasa.bali.tak.masuk.kurikulum.ratusan.mahasiswa.d.emo>

² <http://metroball.com/mangku-pastika-keluarkan-pergub-bahasa-bali-jadi-mata-pelajaran-mandiri/>

Lahirnya Pergub ini yang kemudian mampu menyelamatkan eksistensi bahasa Bali di dunia pendidikan sekaligus menjadi dasar diselenggarakannya Uji Kompetensi Guru Bahasa Bali. Pentingnya pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan, khususnya pendidikan dasar menjadi misi utama dalam pergub ini. Sebab pendidikan dasar adalah pondasi bagi jenjang pendidikan berikutnya, sekaligus menjadi pendidikan yang akan membentuk karakter anak. Haddad (dalam Endraswara, 2016, hlm.7) menunjukkan bahwa bahasa dan tulisan bagi anak yang di sekolah menggunakan bahasa ibu atau bahasa pertama adalah penting. Pentingnya bahasa ibu, tidak hanya untuk pengantar ke bahasa berikutnya, tetapi juga untuk penanaman kepribadian dan pengembangan otak yang terlatih. Bahasa Bali juga merupakan bahasa yang sekaligus mampu mengajarkan nilai karakter, sebab pada dasarnya tingkatan bahasa (*anggha ungguh*) adalah tata bicara yang diatur berdasarkan bentuk hormat atas lawan bicara. Tingkatan bahasa ini mengajarkan penanaman nilai sopan santun melalui bahasa.

Melalui pergub ini, segala komponen penunjang bahasa Bali di jalur pendidikan formal kian dimantapkan. Atas dasar Pergub serta Uji Kompetensi Guru yang telah terpenuhi, bahasa Bali kemudian menjadi salah satu mata pelajaran bahasa daerah yang turut serta dalam program Guru Pembelajar. Salah satu program dalam Guru Pembelajar adalah Program Moda Daring, program ini memungkinkan para guru melakukan diklat melalui jalur daring. Persiapan materi untuk Program Moda Daring ini Aliansi Peduli Bahasa Bali melakukan kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali (LPMP). Program Moda Daring ini hanya dapat diikuti oleh 4 bahasa daerah, diantaranya Jawa, Sunda, Bali dan Madura³.

Setelah sukses bersinergi dengan LPMP Bali dan BOE VEDC Malang dalam menyiapkan program Guru Pembelajar tersebut, Aliansi Peduli Bahasa Bali kembali melakukan pergerakan di tahun 2015 dengan mewacanakan gerakan 1000 Penyuluh Bahasa Bali⁴. Gerakan 1000 Penyuluh Bahasa Bali ini adalah sebuah solusi atas minimnya pengangkatan guru bahasa Bali, dan perlunya penguatan kecintaan masyarakat Bali pada bahasa Bali melalui jalur pendidikan non-formal. Kembali Aliansi Peduli Bahasa Bali menggandeng DPRD Bali dan

³ <https://konten-elearning.siap.id/course/index.php?categoryid=825&lang=en>

⁴ <https://suaradewata.com/read/2015/09/21/2818/DPRD-Bali-Didesak-Revisi-Perda-Bahasa-Bali.html>

Pemerintah Pemprov Bali untuk bersama-sama mewujudkan lahirnya Penyuluh Bahasa Bali⁵. Semangat membentuk Penyuluh Bahasa Bali adalah untuk membangun benteng pelindung bagi bahasa Bali agar langsung mampu menyentuh masyarakat. Selama ini program-program pemerintah yang berkaitan dengan usaha pelestarian bahasa Bali tidak mampu menyentuh langsung masyarakat serta tidak berdampak signifikan.

Penyuluh Bahasa Bali ini direkrut sejumlah desa dinas yang ada di Bali yaitu 716 tenaga penyuluh bahasa Bali. Status Penyuluh Bahasa Bali adalah tenaga kontrak yang bernaung di bawah Pemerintah Provinsi Bali. Penyuluh Bahasa Bali pertama kali bertugas di lapangan pada tahun 2016 dengan menjalankan program kerja yang telah ditentukan. Program-program kerja yang dijalankan Penyuluh Bahasa Bali ini semuanya merupakan gerakan kerja untuk melestarikan bahasa, aksara dan sastra Bali. Penyuluh di awal masa kerjanya telah mampu membuat gerakan yang sangat masif dalam bidang pelestarian bahasa Bali, diantaranya adalah pendataan naskah lontar yang ada di masyarakat. Selama enam bulan awal masa kerjanya, Penyuluh Bahasa Bali mampu mendata 8.366 lontar milik masyarakat Bali⁶. Pendataan ini adalah pertama kali dalam sejarah dokumentasi warisan kebudayaan di Bali. Data yang didapatkan penyuluh di masyarakat mengenai jumlah dan judul lontar ini menjadi bukti bahwa persebaran naskah lontar di masyarakat Bali masih sangat banyak dan merupakan aset budaya yang luar biasa. Selain mendokumentasikan naskah lontar, Penyuluh Bahasa Bali juga melakukan proses konservasi naskah-naskah lontar tersebut, sehingga mampu menyelamatkan masa depan naskah lontar tersebut.

Penyuluh Bahasa Bali juga membentuk kelompok belajar yang menyasar kelompok anak-anak hingga remaja. Kelompok belajar ini menjadi semacam asupan tambahan pelajaran bahasa Bali yang tidak begitu banyak mereka dapatkan di sekolah formal⁷. Kelompok belajar non-formal ini mengambil waktu di luar jam sekolah anak-anak, umumnya penyuluh menggunakan balai desa atau bangunan milik desa yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang belajar, cara belajar pun dilakukan dengan cara-cara yang kreatif sehingga tidak membosankan anak-anak⁸.

⁵ <http://www.balisaja.com/2015/11/pemprov-bali-bakal-angkat-penyuluh.html>

⁶ <https://www.nusabali.com/berita/7518/penyuluh-bahasa-bali-temukan-8366-cakep-lontar>

⁷ <https://bali.antaranews.com/berita/97859/penyuluh-bahasa-bali-bentuk-1820-kelompok-belajar>

⁸ <https://www.kompas.tv/index.php/content/article/17391/video/berita-kompas-tv/bermain-sambil-belajar-bahasa-dan-aksara-bali>

Kelompok belajar ini pun diakhir tahun 2016 bersama-sama dibuatkan festival menulis aksara Bali secara serempak seluruh Bali. Ini pula menjadi festival menulis aksara Bali terbesar yang pernah diselenggarakan secara serempak di seluruh Bali⁹.

Tahun 2016, Aliansi Peduli Bahasa Bali kembali lagi bersinergi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Majelis Guru Mata Pelajaran Bahasa Bali dan LPMP Bali untuk menyatukan persepsi mengenai buku pelajaran bahasa Bali. Pembuatan buku pelajaran bahasa Bali ini dirancang dengan lebih menarik serta disesuaikan dengan perkembangan bahasa Bali. Buku pelajaran ini menjadi buku pelajaran bahasa Bali pertama yang diterbitkan secara resmi oleh Disdikpora Provinsi Bali. Buku pelajaran ini meliputi semua jenjang pendidikan, mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas¹⁰.

Memasuki tahun 2018 kembali Aliansi Peduli Bahasa Bali bersinergi dengan DPRD Provinsi Bali, Akademisi dibidang bahasa Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali melakukan revisi Perda terkait bahasa, aksara, dan sastra Bali. Perda yang menyangkut bahasa, aksara, dan sastra Bali adalah Perda Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Sejatinya revisi Perda ini telah sejak 2015 digaungkan oleh Aliansi Peduli Bahasa Bali, namun realisasi atas revisi Perda ini baru dapat dilakukan 2018. Revisi Perda Nomor 3 Tahun 1992 dilakukan setelah usia Perda tersebut 26 tahun, ini merupakan sebuah kealpaan yang cukup fatal. Ada beberapa alasan mengapa revisi Perda No 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali harus segera dilaksanakan **pertama, secara akademik** Bahasa Bali merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia yang hingga saat ini masih secara aktif digunakan serta difungsikan oleh masyarakat penuturnya yaitu masyarakat etnik Bali. Masyarakat Etnik Bali yang dimaksud adalah Etnik Bali yang tinggal di Bali maupun tinggal di luar Bali. Hingga saat ini, bahasa Bali masih menjadi bahasa pertama bagi sebagian besar etnik Bali, sebab bahasa Bali ini tidak hanya berfungsi dalam komunikasi namun juga berperan vital pada setiap kegiatan adat dan agama (sosial religius) Hindu Bali. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Bali adalah komponen penting yang mendukung eksistensi kebudayaan Bali sebagai salah satu kebudayaan nasional. Jika melihat jumlah masyarakat penutur bahasa Bali yang cukup besar yaitu sekitar 3.330.000 penutur dan memiliki tradisi tulis

⁹ <https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/300651-ribuan-siswa-sd-menulis-cerita-dengan-aksara-bali>

¹⁰ <https://www.posbali.id/buku-bahasa-bali-disusun-tematik-didesain-menarik/>

yang sangat kuat, maka bahasa Bali adalah salah satu bahasa daerah yang besar di Indonesia bahkan dunia (Koran Sindo terbit 30 Oktober 2017). Karena demikian pentingnya posisi bahasa Bali bagi Bali maupun Indonesia maka secara akademik sangat perlu dilakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam pasal-pasal yang tertuang dalam No 03 tahun 1992 sehingga upaya pelestarian bahasa Bali dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kedua, secara sosiologis pentingnya bahasa Bali sebagai bahasa komunikasi membuat perlunya pengaturan penggunaan bahasa Bali secara intensif sehingga upaya pelestarian bahasa Bali dapat dilakukan secara maksimal. Penggunaan istilah-istilah bahasa Bali dalam percaturan bahasa Nasional maupun Internasional sangat penting untuk diatur dan dikembangkan dalam sebuah aturan yang pasti, sehingga eksistensinya dapat terjaga dan berkembang dengan baik. Dengan direvisinya Perda No 03 tahun 1992 diharapkan dapat mengakomodir kepentingan penggunaan bahasa Bali di ranah-ranah publik baik lokal, nasional maupun internasional.

Ketiga, secara empiris bahwa penggunaan bahasa Bali mengalami degradasi karena pengaruh perkembangan zaman dan teknologi yang demikian pesat, maka sangat penting adanya pengaturan penggunaan bahasa Bali secara formal yang diatur oleh aturan. Sehingga dengan direvisinya perda No 03 tahun 1992 diharapkan dapat mengakomodir upaya-upaya peningkatan penutur bahasa Bali bagi masyarakat Bali.

Keempat, Secara yuridis perda no 03 Tahun 1992 tentang bahasa, aksara dan sastra Bali sudah sangat lama yaitu sudah berusia 26 Tahun (1992-2018) sehingga dipandang perlu dilakukan revisi guna dapat mengakomodir hal-hal berkaitan dengan perkembangan bahasa Bali seiring perkembangan zaman serta strukturnya masih sangat sederhana sehingga perlu dilakukan revisi. Di samping itu adanya aturan-aturan baru terkait dengan upaya pelestarian bahasa daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nasional maupun Pemerintah Provinsi yang belum diakomodir di dalam perda No 03 tahun 1992 sehingga diharapkan dengan dilakukan revisi perda tersebut dapat mengakomodir ketentuan-ketentuan yang diundangkan dalam peraturan-peraturan yang sudah ada.

Secara spesifik ada beberapa hal yang diatur secara rinci dalam revisi Perda No 03 tahun 1992, seperti penggunaan bahasa Bali di ranah publik (*dina mabasa Bali*), kejelasan aturan mengenai peningkatan kualitas dan kuantitas pengajaran bahasa Bali di ranah formal maupun non formal termasuk pengembangan kurikulum bahasa Bali yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, pemanfaatan teknologi dalam hal pengembangan bahasa, aksara dan sastra Bali, pemberian kepastian hukum terhadap Penyuluh Bahasa Bali yang sudah bertugas

sebagai ujung tombak pelestarian bahasa Bali, penyediaan tenaga guru bahasa Bali disemua jenjang untuk mendukung pengembangan dan pelestarian bahasa Bali pada masa-masa yang akan datang, hingga pengautan dan pengukuhan Lembaga Bahasa Bali. Perda Nomor 3 Tahun 1992 akhirnya direvisi dan menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.

Satu hal yang cukup menarik dari isi Perda Nomor 1 Tahun 2018 adalah masuknya satu poin yang mengatur tentang mata kuliah penunjang bahasa Bali pada kurikulum setiap perguruan tinggi. Pasal 9b menyebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota berkewajiban untuk berkordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi yang ada di Bali untuk menjadikan bahasa Bali sebagai Mata Kuliah Penunjang sesuai bidang studinya. Pasal ini saat dilakukan sosialisasi ternyata mendapat tanggapan yang sangat positif dari seluruh pimpinan perguruan tinggi yang ada di Bali¹¹.

Aliansi Peduli Bahasa Bali menunjukkan semangat dan dedikasi yang luar biasa dalam usaha-usaha pelestarian bahasa Bali dengan membangun kerjasama yang baik bersama pemerintah. Selain melalui gerakan-gerakan di lapangan, Aliansi Peduli Bahasa Bali juga melakukan edukasi melalui media sosial. Hal ini menjadi salah satu alternatif agar bahasa Bali menjadi lebih dekat dan dapat bersinergi dengan perkembangan teknologi saat ini. Melalui akun *fanpage* di jejaring *facebook*¹², aliansi menyebarkan konten-konten pembelajaran bahasa Bali dengan cara yang mudah untuk dipahami. Tampak dalam setiap postingan pada laman *fanpage* Aliansi Peduli Bahasa Bali selalu ramai respon masyarakat. Bahkan beberapa postingan dibagikan hingga ratusan kali, dan mendapatkan reaksi sangat positif melalui komentar para pengguna media sosial. Pemanfaatan media sosial semacam inilah yang akan lebih banyak mendukung usaha pelestarian bahasa Bali kedepannya.

Lembaga non-pemerintah lainnya yang turut bersinergi dengan pemerintah dalam usaha pelestarian bahasa, aksara dan sastra Bali adalah Hanacaraka Society. Lembaga ini berdiri sejak tahun 2006. Lembaga ini merupakan lembaga yang lebih berkonsentrasi pada usaha-usaha pelestarian naskah-naskah kuno (lontar). Hanacara Society beberapa kali menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah maupun swasta untuk melakukan edukasi pada masyarakat tentang arti

¹¹ <http://www.balipost.com/news/2018/03/25/41009/Bahasa-Bali-Dijadikan-Mata-Kuliah...html>

¹² <https://web.facebook.com/aliansipedulibahasabali/?ref=bookmarks>

pentingnya perawatan naskah lontar. Naskah lontar Bali adalah salah satu manifestasi kebudayaan yang tinggi di Bali. Lontar adalah sebuah media tulis yang terbuat dari daun lontar dan telah melalui beberapa tahap proses sehingga mampu digunakan sebagai media tulis. Tradisi menulis lontar di Bali merupakan sebuah tradisi kuno yang aslinya merupakan tradisi yang berasal dari India Kuno (*pre-modern*). Lontar-lontar di Bali sebagian besar merupakan naskah yang mengandung pengetahuan tradisional seputar astronomi, pengobatan, filsafat, sastra (*kakawin, kidung, parwa, geguritan, dll*). Lontar mencatat berbagai aspek sosial, budaya dan religius masyarakat Bali (Kurnia & Sudarma, 2017:2).

Hanacaraka rutin mengadakan pameran sekaligus mengedukasi masyarakat setiap kali mereka mengadakan pameran tentang naskah lontar. Hal menarik yang dilakukan oleh Hancaraka Society dalam setiap kampanye mengenai naskah lontar, seringkali mereka memilih menggunakan cara-cara yang modern atau memilih lokasi pameran yang menjauhkan kesan seram pada lontar. Sebab selama ini stigma yang berkembang di masyarakat Bali, lontar identik dengan sesuatu yang sakral, usang, dan seram. Seperti pameran lontar yang pernah dilakukan di Hatten Wine Sanur, maupun di Ubud Writers Festival.¹³

Hanacaraka Society sempat bersinergi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam penyelamatan naskah lontar di masyarakat Karangasem ketika Gunung Agung mengalami erupsi. Saat itu Hanacaraka Society menginisiasi evakuasi naskah-naskah lontar di wilayah terdampak erupsi Gunung Agung. Bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali serta Penyuluh Bahasa Bali, tim evakuasi naskah lontar ini bergerak turun ke masyarakat. Banyaknya warga yang belum menganggap lontar sebagai sebuah kekayaan intelektual menyebabkan saat itu warga banyak yang tidak mempedulikan naskah lontarnya. Melalui pendekatan dan pemberian pemahaman betapa berharganya naskah lontar sebagai warisan kekayaan intelektual, maka sebagian warga yang memiliki lontar berkenan mengeluarkan lontar miliknya untuk dievakuasi sementara kondisi Gunung Agung masih tidak menentu. Abu vulkanik menjadi salah satu penyebab kerusakan naskah lontar jika saat itu tidak dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

¹³ <http://bali.tribunnews.com/2016/08/05/27-naskah-lontar-dipamerkan-hatten-wines-sanur>
<http://www.thejakartapost.com/news/2016/10/28/lontar-visual-arts-take-center-stage-uwrf.html>

Hanacaraka Society juga turut menyiapkan ruang penyimpanan bagi naskah yang di bawa dari wilayah Karangasem. Saat itu tak kurang dari 4000 salinan naskah lontar dievakuasi dari Karangasem ke lokasi yang telah disiapkan oleh Hanacaraka Society¹⁴. Tempat penyimpanan sementara ini sudah mendapatkan persetujuan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Selama masa-masa Gunung Agung mengalami fase erupsi yang tidak menentu, Hacaraka Society menggelar beberapa kali diskusi tentang isi lontar yang berkaitan dengan Gunung Agung. Beberapa lontar yang menjadi bahan diskusi ternyata mencatat cukup detail wilayah-wilayah yang pernah terdampak erupsi Gunung Agung sebelumnya¹⁵. Catatan masa lampau ini menjadi bahan rujukan yang sangat berharga bagi tim pengawas Gunung Agung. Catatan-catatan dalam lontar ini menjadi salah satu panduan tim evakuasi untuk memetakan jalur-jalur yang aman bagi warga untuk mengevakuasi diri.

Hanacaraka Society kembali menjalin kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam memberikan pelatihan dan pemahaman lontar bagi siswa-siswa sekolah menengah pertama. Penanaman yang benar mengenai lontar sebagai sebuah warisan kebudayaan sejak dini memang sangat penting. Hal ini untuk mendekatkan kembali generasi muda pada warisan budayanya sendiri. Meski mereka barangkali di lingkungan sekitarnya terdapat lontar, namun kedekatan mereka pada naskah lontar harus mulai dibangun, agar tidak kemudian menjadi generasi yang alpa menjaga warisan intelektual yang paling bernilai¹⁶.

V. PENUTUP

Bahasa daerah adalah salah satu identitas yang melekat pada komunitas sosial etnik dan mampu membangun kesadaran bersama serta mampu membangun integritas sosial. Melalui bahasa daerah kebudayaan-kebudayaan daerah menjadi semakin terkukuhkan posisinya serta terwariskan eksistensinya. Sebabnyalah bahasa daerah memegang peranan besar dalam menjaga keberadaan kebudayaan daerah yang menjadi puncak-puncak budaya nasional. Bahasa Bali sendiri menjadi simbol identitas yang melekat pada Etnik Bali dimanapun mereka berada, sama halnya dengan berbagai tradisi dan adat Bali.

¹⁴ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41397942>

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/29/ox19nc284-disbud-selamatkan-lontar-kuno-dari-erupsi-gunung-agung>

¹⁵ <https://radar.jawapos.com/baliexpress/read/2017/10/03/16951/peta-rawan-bahaya-gunung-agung-ternyata-sudah-ada-dalam-lontar>

¹⁶ <http://www.tatkala.co/2017/11/08/workshop-lontar-bagi-kids-zaman-now-bukan-untuk-belajar-ngeleak/>

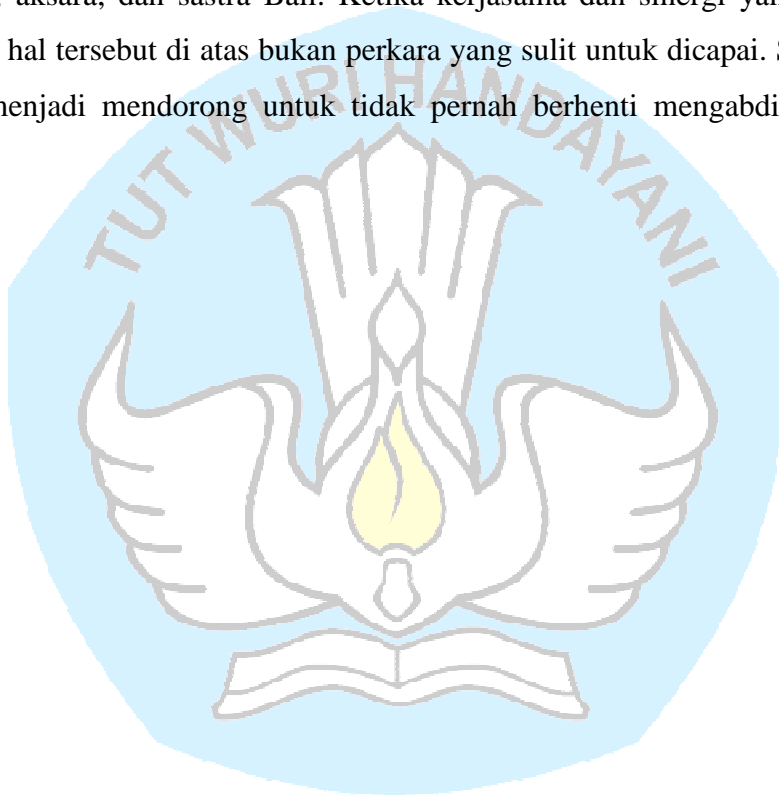
Keberadaan bahasa Bali kini memang tidak dapat dipungkiri telah mengalami berbagai perubahan akibat dari persinggungan manusia Bali pada dunia yang lebih luas. Bahasa sebagai bagian dari sebuah kebudayaan memang tidak dapat dipaksakan untuk tetap statis, sebab budaya sendiri adalah sebuah organisme hidup yang terus akan bergerak dengan sangat dinamis. Namun demikian, tetaplah harus dipertahankan dan dijaga nilai-nilai serta kekhasan yang positif dari elemen kebudayaan tersebut. Sebab disadari atau tidak, kebudayaan adalah sebuah aset besar yang mampu membangun sebuah bangsa menjadi besar. Secara bijaksana dan arif usaha pemertahan dan pengembangan bahasa Bali mesti tetap dilaksanakan mengikuti perkembangan masyarakat penuturnya.

Bahasa Bali memang telah sejak lama dikhawatirkan akan mengalami kemerosotan, dan memang nyata hal itu terjadi dari waktu ke waktu. Namun demikian, disisi lain hadir pihak-pihak yang sangat optimis bahwa bahasa Bali akan tetap bertahan, serta mengembangkan peran-perannya seiring jaman yang terus berkembang. Bahkan persebaran bahasa Bali kian luas sebab tidak saja di Bali bahasa ini digunakan, penutur utama bahasa Bali (etnik Bali) tidak hanya di Bali saja, mereka menyebar dengan tetap membawa berbagai komponen identitas budayanya.

Usaha-usaha dalam pemertahanan bahasa, aksara, dan sastra Bali tidak dapat dilakukan secara individu, dibutuhkan kerjasama yang baik antar semua pemilik kepentingan bahasa, baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Sinergi yang baik diantara lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang memiliki semangat sama dalam melestarikan bahasa Bali harus terus ditingkatkan dan digalakkan. Peranan lembaga pemerintah yang sudah memiliki aturan serta payung hukum, memungkinkan untuk menyiapkan program dan anggaran guna menjalankan segala usaha pemertahanan bahasa, aksara dan sastra Bali. Sementara itu lembaga non-pemerintah mampu menjadi rekan kerja yang sifatnya independen namun tetap memiliki integritas serta loyalitas.

Setidaknya terdapat tiga hal penting yang mesti dikerjakan untuk mempertahankan bahasa, aksara, dan sastra Bali ke depan, pertama adalah perencanaan bahasa yang betul-betul baik sehingga tepat sasaran. Usaha ini memang membutuhkan pemikiran yang matang dari berbagai pihak. Kedua adalah pekasanaan atas perencanaan yang telah dibuat dengan sangat baik. Melaksanakan perencanaan bahasa yang telah dibuat dengan matang tidak saja

membutuhkan semangat dan keseriusan, namun mesti didukung pula dari pembiayaan yang baik. Hal ini dapat diatasi melalui penganggaran yang baik pada tataran lembaga pemerintah, pada tataran non-pemerintah bisa dilakukan dengan mencari donatur-donatur atau memaksimalkan peran dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan-perusahaan yang terdapat di Bali. Ketiga adalah peningkatan rasa kepemilikan terhadap bahasa Bali, hal ini terutama harus ditanamkan pada generasi muda penutur bahasa Bali. Sebab dengan memiliki rasa kepemilikan yang baik, maka akan dengan sendirinya muncul kesadaran untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat konservatif, sehingga semakin beragam jalan yang muncul untuk mempertahankan eksistensi bahasa, aksara, dan sastra Bali. Ketika kerjasama dan sinergi yang telah terbangun matang maka tiga hal tersebut di atas bukan perkara yang sulit untuk dicapai. Semangat *Sutindih ring basa Bali* menjadi mendorong untuk tidak pernah berhenti mengabdikan diri pada ibu bahasa Bali.



Daftar pustaka

- Ardika, I Gede. 2006. “Kebijakan, strategi dan Revitalisasi Bahasa Bali”. Makalah yang disampaikan dalam Kongres bahasa Bali VI di Denpasar.
- Bachore, Mebratu Mulatu. 2014. “The Role of Mother Tongue Based Education in Ensuring the Quality of Classroom Instruction: Opportunities and Challenges”. *Journal of Education and Literature*, Vol. 1, No. 1, 2014, 31-38. Dikutip dari <http://www.rassweb.org/Journal-of-Education-and-Literature.html>
- Chaer, Abdul & Agustina, Leonie. 2010. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwis, Muhhamad. 2011. “Nasib Bahasa Daerah di Era Globalisasi: Peluang dan Tantangan”. Makalah disampaikan dalam Workshop Pelestarian Bahasa Daerah Bugis Makassar. Balitbang Agama Makassar. Dikutip dari <http://repository.unhas.ac.id>
- Duija, Nengah I. 2006. “Agama Hindu Sebagai Bentuk Pemertahanan, Aksara, Bahasa, dan Sastra Bali dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat Bali”. Makalah yang disampaikan dalam Kongres bahasa Bali VI di Denpasar.
- Endraswara, Suwardi. 2016. “Mungkinkah Bahasa Jawa dijadikan Bahasa Pengantar dalam Pelbagai Mata Pelajaran di PAUD dan Sekolah Dasar”. Makalah yang disampaikan dalam Kongres Bahasa Daerah Nusantara 2016.
- Fasold, Ralph. 1987. *The Sociolinguistics of Society*. New York: Basil Blackwell Ltd.
- Fishman, Joshua A. (ed.). (1974). *Advanced in Language Planning*. The Hague: Mouton.
- Ibrahim, Gufran Ali. 2011. “Bahasa Terancam Punah: Fakta, Sebab-Musabab, Gejala, dan Strategi Perawatannya”. *Linguistik Indonesia*, Tahun ke-29, No.1, Februari 2011, 35-52. Dikutip dari <http://www.linguistik-indonesia.org>
- Jendra, I Wayan. 2006. Sikap Penutur Bahasa Bali dan Pemakaian Bahasa Bali. Makalah yang disampaikan dalam Kongres bahasa Bali VI di Denpasar.
- Jendra, Made Iwan Indrawan. 2011. *Sosiologi Bahasa Bali*. Penerbit Vidia: Denpasar.

Kurnia, Putu Ari & Ida Bagus Komang Sudarma.”Cultural Entropy on Digitizing Balinese Lontar Manuscripts: Overcoming Challenges and Seizing Opportunities”. World Library and Information Congres 2017.

Sutjiati, Beratha, N.L., *et al.* 2017. “Balinese Language Ecology: Study Aboout Language Diversity in Tourism Area at Ubud Village”. Jurnal Kajian Bali, Vol. 07, No. 02, Oktober 2017, 121-134.

Suryani. 2014. “Hubungan Fakta Geopolitik dengan Perencanaan Bahasa”. Jurnal Sosioteknologi, Vol. 13, No. 1. April 2014. 34-40.

Syahriyani, Alfi. 2017. “Pemertahanan Bahasa Jawa Dialek Banten pada Guyub Tutur di Kelurahan Sumur Pecung Serang”. Buletin Al-Turas, Vol XXIII No. 2, Juli 2017, 251-266.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Perda No. 3 Tahun 1992 Tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.

Perda No. 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.

Pergub Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Daerah Bali.

